

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara yang memiliki kesejahteraan sosial tinggi. Kesejahteraan sosial merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial No 11 Tahun 2009 pasal 1 menyebutkan bahwa “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

IPM Indonesia pada tahun 2011 berada di peringkat 124 dari 187 negara berdasarkan data dari United Nations Development Program (UNDP). Berdasarkan peringkat IPM ini diketahui bahwa taraf hidup yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia masih rendah bila dibanding dengan negara lain. Kesejahteraan sosial Indonesia akan tercapai apabila taraf hidup yang berkaitan dengan kebutuhan material, spiritual, serta sosial masyarakat telah terpenuhi.

Kesejahteraan sosial berbanding terbalik dengan masalah sosial, jika sebuah negara telah mencapai kesejahteraan sosial maka tingkat masalah sosial yang dihadapi negara tersebut juga rendah berbeda halnya ketika kesejahteraan sosialnya

masih rendah maka tingkat masalah sosial yang dihadapi negara tersebut masih cukup tinggi, Merton (Abu Huraera, 2008:5) mengemukakan bahwa :

Masalah sosial selalu mengacu kepada suatu jurang antara harapan-harapan yang ada, baik pada seorang individu maupun suatu kelompok, dengan kenyataan-kenyataan mengenai kebutuhan-kebutuhan apa yang dapat dipenuhi, nilai-nilai, dan tujuan-tujuan apa yang bisa tercapai, bagaimana seseorang seharusnya bertindak, dan apa yang dapat diperoleh orang di dalam suatu masyarakat.

Masalah sosial yang terjadi di Indonesia meliputi kemiskinan, jumlah penduduk tinggi, kelaparan, kekurangan gizi serta tingginya angka kecacatan, selain itu juga terdapat masalah sosial yang sifatnya sementara seperti korban bencana sosial akibat konflik, korban tindak kekerasan dan penyalahgunaan narkoba. Semakin berkembangnya permasalahan sosial yang terdapat di Indonesia menjadi tantangan bagi terciptanya kesejahteraan sosial.

Masyarakat yang tertimpa masalah sosial disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Permensos No 08 tahun 2012 tentang Pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial menyebutkan bahwa:

PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan dan gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Melalui pengertian tersebut, maka untuk dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali PMKS membutuhkan bantuan serta dukungan yang bukan hanya berasal dari dirinya semata melainkan juga dari lingkungan sekitarnya.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) merupakan anggota masyarakat yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan bertugas dalam membantu menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang berada di sekitarnya. Menurut Undang-undang kesejahteraan sosial No. 11 tahun 2009 menyebutkan bahwa :

Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

TKSM juga adalah ujung tombak pemerintah untuk membantu memecahkan permasalahan sosial yang dialami oleh PMKS. TKSM berusaha untuk membantu PMKS memecahkan permasalahannya melalui pekerjaan sosial yang dilakukan oleh TKSM. Zastrow (Abu Huraerah, 2008:38) mengungkapkan pengertian dari pekerjaan sosial yaitu :

Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Pekerjaan sosial bukan hanya aktivitas kegiatan menolong yang dilakukan oleh TKSM semata melainkan harus mampu untuk memberdayakan PMKS tersebut agar mampu hidup mandiri. Keberadaan dari TKSM ini perlu diberikan apresiasi, karena dengan perkembangan zaman yang terjadi sekarang ini telah membawa dampak yang kurang baik terhadap nilai dan norma yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Kompetensi yang semakin tinggi menyebabkan semakin berkembangnya sikap individualis masyarakat. sehingga jiwa sosial yang dimiliki semakin menipis. Dalam

membantu PMKS diperlukan masyarakat yang memiliki jiwa sosial serta toleransi yang tinggi.

Berdasarkan kepada hasil *Training Need Assesment* (Analisis Kebutuhan Pelatihan) yang dilakukan oleh BBPPKS-Lembang menyebutkan bahwa “kinerja yang ditunjukkan oleh TKSM dalam melakukan pekerjaan sosial terhadap PMKS masih rendah sehingga masih perlu untuk ditingkatkan agar dapat mewujudkan mutu pelayanan yang lebih baik”. Kepedulian sosial semata bukan jaminan untuk mampu membantu PMKS, namun juga harus dibuktikan dengan kinerja yang dilakukan oleh TKSM. Moehariono (2010:60) berpendapat bahwa “kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan”. Sedangkan Mangkunegara (2011:67) berpendapat bahwa, “Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya”. Berdasarkan pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar pekerjaan sosial, latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh TKSM bukan pekerjaan sosial ataupun kesejahteraan sosial, sehingga diperlukan upaya pemberian pengetahuan tentang pekerjaan sosial agar pekerjaan sosial yang dilakukannya tepat dan berkualitas.

Keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial perlu ditopang oleh kualitas serta kuantitas TKSM yang memadai, artinya TKSM harus menguasai disiplin ilmu pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Upaya meningkatkan kualitas TKSM ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan yang dilakukan oleh BBPPKS sebagai salah satu lembaga profesional yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

bagi para tenaga kesejahteraan sosial. Pada tanggal 15 hingga tanggal 25 Februari 2012, BBPPKS menyelenggarakan sebuah pelatihan yang dinamakan “Pelatihan Dasar Pekerjaan Sosial (PDPS) Bagi TKSM”. Oemar Hamalik (2000:11) menyebutkan bahwa pelatihan adalah:

Suatu proses yang meliputi serangkaian tindak (upaya) yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh profesional, berlangsung dalam satuan waktu tertentu, bertujuan meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu.

Pelatihan dasar pekerjaan sosial membantu TKSM dalam mendapatkan berbagai pengetahuan serta wawasan mengenai pekerjaan sosial yang dapat menunjang tugas-tugas yang dikerjakannya. Peningkatan pengetahuan tersebut terjadi sebagai akibat dari hasil belajar yang telah dilaluinya. Dimiyati dan Mudjiono (2009:30) menyatakan bahwa “hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar” dalam konteks pelatihan disebut sebagai hasil pelatihan. D. Sudjana (2008:18) menyebutkan bahwa hasil pelatihan atau *output* adalah “perubahan perilaku dalam ranah kognisi, psikomotorik dan afeksi”. Hasil pelatihan dapat diketahui melalui kegiatan evaluasi pelatihan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kegiatan evaluasi hasil pelatihan yang dilakukan oleh BBPPKS sebagai penyelenggara pelatihan dasar pekerjaan sosial hanya melakukan evaluasi pelatihan pada aspek kognitif dari peserta pelatihan.

Tujuan dari penyelenggaraan PDPS adalah untuk meningkatkan pengetahuan TKSM sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja dari TKSM dalam membantu PMKS mencapai kesejahteraan sosial. Ketika alumni pelatihan (TKSM)

kembali ke tempat kerjanya masing-masing maka akan terjadi proses penerapan atau implementasi dari hasil pelatihan ke dalam pekerjaan. Jika TKSM alumni pelatihan telah mampu untuk meningkatkan kinerjanya melalui proses implementasi hasil pelatihan dasar pekerjaan sosial maka akan berdampak terhadap kesejahteraan sosial yang dimiliki oleh PMKS sebagai penerima manfaat dari pekerjaan sosial yang dilakukan oleh TKSM.

Berdasarkan pada uraian yang ada maka peneliti mencoba untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui dampak yang terjadi pada kesejahteraan sosial masyarakat. Penelitian ini dilakukan terhadap alumni pelatihan dasar pekerjaan sosial (PDPS) provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan di BBPPKS-Bandung.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. BBPPKS sebagai penyelenggara pelatihan hanya melakukan penilaian hasil pelatihan pada aspek kognitif peserta, sehingga perkembangan yang terjadi pada aspek kognitif dan psikomotorik peserta tidak terukur.
2. TKSM dihadapkan dengan berbagai hambatan dalam mengimplementasikan hasil pelatihan ke dalam pekerjaan yang dilakukannya seperti masih kurangnya sarana dan prasana yang dimiliki di tempat mereka bekerja.
3. Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh TKSM bervariasi namun sebagian besar dari TKSM tidak memiliki latarbelakang pendidikan dari pekerjaan sosial sehingga pengetahuan yang mereka miliki masih minim.

4. Setelah TKSM mengikuti pelatihan dasar pekerjaan sosial semakin banyak program pekerjaan sosial yang dilakukan bagi PMKS seperti RTLH, KUBE, dsb. Sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS yang mendapatkan bantuan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Dampak Pelatihan Dasar Pekerjaan Sosial terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat?”

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka Peneliti menyusun pertanyaan penelitian sebagai fokus dalam melakukan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil pelatihan dasar pekerjaan sosial bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) di BBPPKS-Bandung ?
2. Bagaimana implementasi hasil pelatihan dasar pekerjaan sosial dalam meningkatkan kinerja TKSM ?
3. Bagaimana dampak pelatihan dasar pekerjaan sosial terhadap kesejahteraan sosial masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuannya, ialah :

1. Mengetahui hasil pelatihan dasar pekerjaan sosial bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) yang diselenggarakan di BBPPKS-Bandung
2. Mengetahui implementasi pelatihan dasar pekerjaan sosial terhadap peningkatan kinerja Tenaga Kerja Sosial Masyarakat (TKSM)

3. Mengetahui dampak yang terjadi dari implementasi hasil pelatihan dasar pekerjaan sosial yang dilakukan oleh TKSM terhadap kesejahteraan sosial masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan, serta bahan dalam pengembangan ilmu pendidikan luar sekolah, terutama dalam program pelatihan.

2. Manfaat Praktis (Operasional)

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti, umumnya dalam bidang pendidikan luar sekolah dan khususnya dalam bidang evaluasi hasil pelatihan dan dampak pelatihan.

b. Bagi Pihak penyelenggara

Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan masukan bagi penyelenggara dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan pelatihan di lembaga yang terkait.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Melalui penelitian ini, peneliti berharap agar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian yang dilakukan bagi para peneliti selanjutnya.

E. Struktur Organisasi Skripsi

BAB I PENDAHULUAN berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA berisi konsep pelatihan, pekerja sosial, konsep kinerja.

BAB III METODE PENELITIAN yang berisi tentang lokasi penelitian, subyek penelitian, metode penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, desain penelitian, analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisi mengenai pembahasan dari penelitian tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN berisi mengenai kesimpulan dan saran dalam melakukan penelitian.